

Transformasi pendidikan dan strategi pembangunan pemuda melalui program pendampingan warga belajar di kabupaten banjarnegara

Abi Umaroh, Radite Rangi Ananta, Syifa Yustiana
Universitas Negeri Semarang
PW IPM Jawa Tengah
(e-mail: abiumar60@gmail.com)

Abstract

The issue of high dropout rates poses a significant challenge in the education sector in Indonesia, especially in the rural areas of Banjarnegara Regency. This research focuses on examining and providing recommendations for implementing the Learner Mentoring Program as an alternative solution to reduce the impact of school dropouts. With a qualitative descriptive approach based on the Participatory Action Research (PAR) method, this study involves interviews and direct observations with youth and stakeholders in the education sector. Research results show that non-formal education provided through mentoring programs is important in improving equal access to education for school dropouts. In addition, this program equips participants with life skills and soft skills that support improving human resource quality and youth development in the region. This research concludes that the mentoring program effectively reduces dropout rates and contributes to youth development by strengthening the community's economy and the participants' independence.

Keywords: dropout rates, mentoring program, youth development

Abstrak

Masalah tingginya angka putus sekolah menjadi tantangan signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama di daerah rural di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini berfokus mengkaji dan memberikan rekomendasi pada pelaksanaan Program Pendampingan Warga Belajar sebagai solusi alternatif untuk mengurangi dampak putus sekolah. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan metode Participatory Action Research (PAR), penelitian ini melibatkan wawancara dan observasi langsung dengan para pemuda serta pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan nonformal yang disediakan melalui program pendampingan berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan setara bagi masyarakat yang putus sekolah. Selain itu, program ini membekali peserta dengan keterampilan hidup dan soft skills yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan pemuda di wilayah tersebut. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa program pendampingan belajar tidak hanya efektif dalam mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga memberi kontribusi pada pembangunan pemuda berupa penguatan ekonomi masyarakat dan kemandirian peserta.

Kata kunci: angka putus sekolah, pembangunan pemuda, pendampingan belajar

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal vital bagi individu dalam memenuhi kebutuhan dan hak dalam hidupnya. Pendidikan juga merupakan bentuk pengembangan diri bagi individu dalam

meningkatkan kualitas diri. Dalam Sulfasyah (2017), setiap individu tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari yang mana pendidikan akan berdampak pada karakter individu. Dengan demikian, idealnya setiap anak di seluruh dunia bisa dengan gampang mengakses pendidikan untuk menunjang kualitas diri dan kehidupan sosialnya. Namun pada prakteknya, tidak setiap anak di muka bumi ini berkesempatan untuk merasakan manisnya menimba ilmu dalam dunia pendidikan.

Indonesia sebagai negara berkembang yang dihuni oleh lebih dari 281,6 juta jiwa pada tahun 2024 juga menyimpan beragam persoalan dalam dunia pendidikan. Terdapat 8 persoalan pendidikan di Indonesia yang sering muncul ke permukaan, yaitu; (1) Rendahnya sarana fisik, (2) Rendahnya kualitas guru (3) Rendahnya kesejahteraan guru (4) Rendahnya prestasi siswa (5) Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan (6) Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan (7) Mahalnya biaya pendidikan (8) Tingginya angka putus sekolah (Agustang, dkk., 2021).

Terdapat berbagai faktor yang menjadi latar belakang timbulnya masalah-masalah dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah disparitas pendidikan atau ketimpangan pendidikan (Megawanti, 2015). Ketimpangan pendidikan ini juga dapat memicu munculnya permasalahan yang berkembang pada sektor lain seperti kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya partisipasi pendidikan dari kelompok rentan, kurangnya kesempatan untuk pengembangan potensi individu, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dapat berdampak pada munculnya berbagai masalah dan rendahnya kualitas pendidikan di beberapa wilayah.

Dalam tulisan ini, penulis mengkonsentrasikan tulisannya pada masalah tingginya angka putus sekolah yang mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia. Pasca Pandemi Covid-19, Data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) mengungkapkan dari tahun 2021 hingga 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam angka putus sekolah di berbagai tingkatan pendidikan. Pada tahun 2021, peningkatan tercatat di tingkat SD sebesar 0,12%, SMP naik 0,90%, dan SMA mengalami kenaikan 1,12%. Sedangkan, di tahun 2022, peningkatan tersebut semakin meningkat, terutama di tingkat SD dengan angka 0,13%, di SMP naik menjadi 1,06%, dan di SMA mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 1,38% hal ini menggambarkan terdapat 13 dari 1.000 pelajar putus sekolah. Data ini mengindikasikan bahwa tantangan pendidikan di Indonesia semakin mendalam. (BPS, 2022).

Permasalahan tingginya angka putus sekolah juga turut tercermin di Kabupaten Banjarnegara. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) remaja berusia 25 tahun hanya mencapai 7,16 tahun untuk laki-laki dan 6,61 tahun untuk perempuan. Angka ini sejalan dengan penilaian Indeks Pembangunan Pemuda di Jawa Tengah, yang tercatat senilai 53,33 dan tergolong rendah, terutama di domain pendidikan. Situasi ini menggambarkan tantangan serius yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan nilai indeks pembangunan manusia di tingkat regional.

Angka putus sekolah juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesulitan ekonomi dalam perspektif kemiskinan dan pernikahan usia anak, karena keduanya menciptakan hambatan struktural dan sosial dalam akses pendidikan. Secara ekonomi, keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya biaya untuk membayar uang sekolah, transportasi, buku, dan perlengkapan lainnya. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin lebih mungkin untuk terpaksa bekerja untuk membantu menopang ekonomi keluarga daripada melanjutkan pendidikan. Terhitung data Kemdikbud, terdapat 11.477 pelajar di Kabupaten Banjarnegara yang keluar dari sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan.

Fenomena pernikahan usia anak juga berdampak langsung pada putus sekolah. Data menunjukkan bahwa di Banjarnegara terdapat 25,93 persen jumlah pernikahan usia anak, 84 persen di antaranya adalah perempuan. Setelah menikah, anak-anak seringkali diharapkan untuk mengambil peran domestik sebagai istri dan ibu, yang mengurangi bahkan menghilangkan kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, pernikahan dini sering kali membawa tanggung jawab tambahan seperti kehamilan dan pengasuhan anak, yang semakin membatasi waktu dan energi mereka untuk belajar. Secara ilmiah, pendidikan yang terputus akibat pernikahan dini memperburuk bahkan akan meneruskan siklus kemiskinan antar-generasi, karena mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung memiliki peluang kerja yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih kecil.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan memberi rekomendasi pada pelaksanaan Program Pendampingan Warga Belajar, salah satu alternatif untuk membantu pemerintah mengatasi dampak putus sekolah yang ada di lingkungan pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Inisiatif ini merupakan respons penulis terhadap keprihatinannya atas tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut. Tujuan utamanya adalah menyediakan fasilitas dan akses pendidikan gratis bagi individu-individu yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah formal.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terutama pembangunan pemuda di Kabupaten Banjarnegara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini akan didorong melalui dua aspek penting yaitu pembelajaran formal dan pemberdayaan soft skill. Peserta pelatihan juga akan mendapatkan ijazah yang setara dengan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal, sehingga nantinya dapat mendukung karir mereka untuk bekerja di dunia profesional serta menyiapkan peserta dalam kemandirian berwirausaha.

2. Tinjauan Pustaka

Pendidikan nonformal merupakan salah satu bentuk pendidikan yang berperan penting dalam memberikan akses pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan formal. Pendidikan nonformal sering kali mencakup program-program seperti pelatihan keterampilan hidup, kursus vokasional, dan pendidikan keaksaraan, yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Menurut Syaadah (2022), pendidikan nonformal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu yang beragam dan memperbaiki kualitas hidup mereka melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat.

Selain itu, menurut Puspito, dkk. (2021) menyatakan bahwa pendidikan nonformal memiliki fleksibilitas dalam kurikulum dan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan nonformal menjadi sangat penting di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, seperti daerah pedesaan atau terpencil, karena dapat menjangkau lebih banyak peserta yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal (Dacholfany, 2018). Di Indonesia, peran pendidikan nonformal didukung oleh kebijakan pemerintah melalui program Kejar Paket A, B, dan C serta program pelatihan

keterampilan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

Pembangunan pemuda adalah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan potensi generasi muda agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Fitriyanti (2022) menyatakan bahwa pembangunan pemuda bukan hanya tentang memberikan akses pendidikan, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, partisipasi sosial, dan peningkatan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Menurut Kartono (2003), pemuda sebagai generasi penerus bangsa memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri agar dapat menjadi agen perubahan yang berkualitas.

Pembangunan pemuda memiliki standar kuantitatif, yaitu Indeks Pembangunan Pemuda. Indeks ini membahas indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan potensi pemuda di suatu negara atau wilayah dalam berbagai aspek pembangunan (Nopeline, dkk., 2021). IPP menggabungkan sejumlah dimensi yang relevan dengan kondisi pemuda, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi, dan lingkungan. IPP bertujuan untuk memberikan gambaran seberapa jauh pemuda memiliki akses terhadap peluang dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan kesuksesan dalam hidup.

Pendampingan warga belajar merupakan salah satu metode dalam pendidikan nonformal yang bertujuan untuk membantu peserta didik, terutama di kalangan masyarakat dewasa atau pemuda yang putus sekolah, agar mereka dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pendampingan ini biasanya dilakukan oleh fasilitator atau tutor yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Menurut Santoso (2019), pendampingan dalam pendidikan mencakup pemberian dukungan secara personal dan sosial agar peserta didik memiliki rasa percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Hal ini terbukti efektif karena dapat mendorong perubahan sosial yang transformatif dengan berfokus pada kekuatan dan kebutuhan pendidikan lokal (Popielarz, 2022).

Lebih lanjut, Suwarma (2023) menyatakan bahwa pendampingan warga belajar tidak hanya membantu dalam aspek akademis tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan hidup dan pemecahan masalah, yang penting untuk kemandirian. Pendampingan ini juga dapat menjadi sarana bagi pemuda untuk mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi tantangan di dunia kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Program pendampingan warga belajar di daerah rural telah terbukti membantu meningkatkan literasi, keterampilan dasar, dan kemandirian ekonomi masyarakat (Fauziah, 2022). Pendampingan warga belajar berperan sebagai bentuk intervensi pendidikan yang bersifat inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Pendampingan belajar juga berperan penting dalam transformasi masyarakat dengan menawarkan berbagai program pendidikan dan layanan komunitas yang meningkatkan kualitas hidup (Sharma, 2015).

Maka, sebagai respons konkret atas keprihatinan tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Banjarnegara, penyusun menginisiasi program bernama "Pendampingan Warga Belajar", sebagai varian alternatif dari program kejar paket. Program ini bertujuan untuk memberikan peluang pendidikan dan pemberdayaan softskill bagi masyarakat, utamanya anak muda yang belum mendapat kesempatan mengenyam pendidikan formal sampai selesai. Proyek Kepemimpinan Pemuda secara signifikan dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan kesadaran masyarakat di kalangan pemuda pedesaan (Puxley, 2021). Hipotesis sementara dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara proses pendampingan belajar dengan kondisi pembangunan pendidikan dan pemuda pada masyarakat.

3. Metode Penelitian

Metode yang ditempuh dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis isu secara koheren dan fleksibel dalam lapangan, sehingga hasil yang didapatkan bisa holistik. Variabel yang terdapat pada penelitian ini di antaranya yaitu pendidikan, pembangunan pemuda, dan pendampingan belajar. Beberapa metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Data primer didapatkan dari wawancara yang dilakukan bersama stakeholder di bidang pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dengan observasi lapangan yang dilakukan bersama pemuda di area Kecamatan Batur, Banjarnegara. Metode lain yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode *PAR* atau *Participatory Action Research*. Metode *PAR* berfokus pada pembelajaran bersama dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga untuk mendorong perubahan sosial keagamaan yang berkelanjutan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Metode *PAR* dianggap sebagai pendekatan transformatif karena proses penelitiannya berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan yang terus berlanjut. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap penelitian, dari perumusan masalah hingga penerapan solusi. Pendekatan *PAR* ini sesuai dengan konsep riset transformatif, yaitu penelitian yang berasal dari, dilakukan oleh, dan untuk kepentingan masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

Penulis memandang akan pentingnya pelaksanaan Program Pendampingan Warga Belajar sebagai tindakan konkret yang mampu dilakukan atas persoalan pendidikan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, yaitu tingginya angka putus sekolah. Program ini tidak hanya dirancang untuk mawadahi, melainkan juga memfasilitasi individu-individu yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal di sekolah. Disamping mempelajari mata pelajaran umum, program, ini juga akan menawarkan berbagai macam pelatihan keterampilan atau soft skill untuk dapat menunjang kemampuan serta kualitas individu. Maka menjadi penting program ini direalisasikan untuk mendorong pembangunan pemuda sekaligus meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah.

Project ini diinisiasi oleh penulis pada saat menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara. Tidak sendirian, penulis menggandeng Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara (Dindikpora Banjarnegara) untuk bersinergi bersama menjalankan project sebagaimana dimaksud. Program Pendampingan Warga Belajar ini nantinya akan menyasar kepada masyarakat di wilayah pedesaan yang tidak dapat menuntaskan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian gagasan tersebut dikembangkan lagi bersama Tim dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Fokus utama yang menjadi sasaran peserta dalam program ini adalah mereka-mereka yang masih tergolong sebagai usia produktif, supaya nantinya ijazah dan ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk bekerja.

Pilot project Program Pendampingan Warga Belajar ini nantinya akan dilaksanakan di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Alasan dipilihnya Kecamatan Batur adalah karena Kecamatan tersebut menjadi salah satu Kecamatan dengan angka putus sekolah

tertinggi yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dengan demikian maka Program Pendampingan Warga Belajar akan mengenai sasaran yang tepat.

Program Pendampingan Warga Belajar akan memiliki fokus untuk melakukan pendataan dan menyediakan fasilitas pembelajaran kepada individu-individu yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah formal. Langkah ini mengutamakan upaya untuk mengatasi dampak yang dimunculkan dari persoalan putus sekolah dan rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia, dengan 4 (empat) sasaran program sebagai berikut:

Tabel 1. Empat Sasaran Program Pendampingan Warga Belajar

No	Jenis Program	Bentuk Program
1.	Pendidikan Formal dan Pemberdayaan keterampilan (<i>Soft skill</i>)	Program ini tidak hanya berkutat pada materi pelajaran formal, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan (<i>soft skill</i>) yang krusial. Selain mata pelajaran seperti halnya di lingkungan sekolah, Peserta akan dibekali dengan keterampilan seperti komunikasi, kerja tim, pemecahan masalah, dan adaptabilitas, untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Beberapa materi yang akan menjadi fokus pada program ini diantaranya: 1. Materi akademik Semester 1 : Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS PPKN, Seni Budaya, Olahraga, Prakarya, dan Bahasa Inggris. 2. Materi non-akademik (<i>soft skill</i>) Semester 1: Manajemen Waktu dan Komunikasi Efektif. Pada semester 2 berfokus pada penguasaan pengembangan keterampilan diantaranya; 1. Materi akademik semester 2: Kelas Tata Boga, Kelas Teknologi dan Komunikasi, Desain Grafis, Keterampilan Teknik dan Otomotif. 2. Materi non akademik semester 2: Pengenalan E-Commerce dan marketplace, pembuatan konten digital, keuangan digital, penggunaan dan pemanfaatan AI.
2.	Frekuensi	Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung dua kali dalam satu pekan, pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan demikian, pelajar dewasa yang ingin kembali melanjutkan pendidikan memiliki fleksibilitas waktu untuk kembali melanjutkan pendidikan formalnya.
3.	Kemitraan antara PD IPM dan Dindikpora Kabupaten Banjarnegara	Kolaborasi antara PD IPM dan Dinas Pendidikan menjembatani kebutuhan pendidikan dan dukungan akademis. PD IPM akan memastikan calon warga belajar terdata dengan baik, sementara Dinas Pendidikan akan menghadirkan tenaga pengajar berkualitas dan kurikulum pembelajaran yang sesuai. Serta mengeluarkan ijazah setara pendidikan formal.

No	Jenis Program	Bentuk Program
4.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Langkah ini akan berperan penting dalam mendorong terwujudnya tujuan dari <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di sektor pendidikan, dengan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banjarnegara. Peningkatan ini tidak hanya terukur dari segi pendidikan formal, tetapi juga peningkatan <i>soft skill</i> dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Secara signifikan, Program Pendampingan Warga Belajar memiliki peran penting dalam pengembangan holistik individu. Pada jangka pendek, program ini memberikan peluang pendidikan formal lebih cepat, juga keterampilan dasar yang relevan untuk akses lapangan pekerjaan. Pada jangka menengah program ini akan membentuk dasar perkembangan individu dan karirnya di dunia profesional. Pada jangka panjang Program Pendampingan Warga Belajar memiliki tujuan yang luas, mencakup penyetaraan pendidikan dan mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Selain itu, program ini juga dapat dijadikan sebagai tindakan konkrit untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi bangsa Indonesia di tahun-tahun yang akan datang.

Program ini berupaya mengurangi kesenjangan pendidikan dengan memberikan akses pendidikan berkualitas secara merata, sehingga setiap warga, utamanya yang kurang terjangkau oleh sistem formal, mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Program ini juga bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif menuju visi Indonesia Emas 2045, yaitu menciptakan generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan global dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan di era digital dan revolusi industri 4.0. Selain itu, optimalisasi bonus demografi dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar populasi usia produktif yang besar dapat berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta menciptakan masyarakat yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Langkah-langkah strategis untuk melaksanakan Program Bantuan Warga Belajar dalam mengatasi putus sekolah di Kabupaten Banjarnegara perlu dirumuskan secara sistematis agar program ini berjalan dengan maksimal:

1. Sosialisasi Program bersama PC IPM Kecamatan Batur

Langkah awal yang harus dilakukan pada pengimplementasian program ini adalah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Batur. Sosialisasi ini dilakukan sebagai pengenalan serta penyalarsan gagasan, arah gerak program serta peran strategis kepada PC IPM sebagai aktor pendukung dalam pelaksanaannya.

2. Survei Minat dan Kebutuhan Pendidikan bagi Anak/Orang Dewasa yang Putus Sekolah

PD IPM Kabupaten Banjarnegara bersama Lembaga Pengembangan Sumberdaya Insani PW IPM Jawa Tengah akan melakukan survei untuk mengidentifikasi minat dan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah. Survei ini dapat dilakukan melalui pendekatan langsung ke komunitas lokal, sekolah, dan keluarga yang terdampak. Hasil survei ini akan memberikan data konkret mengenai jumlah calon peserta program, tingkat pendidikan yang diperlukan, serta minat mereka dalam

melanjutkan pendidikan atau mengembangkan keterampilan tertentu. Langkah ini penting untuk memetakan kebutuhan spesifik di setiap daerah.

3. Audiensi dengan Dikdasmen Kabupaten Banjarnegara

Setelah survei dilakukan, langkah selanjutnya adalah audiensi dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kabupaten Banjarnegara. Audiensi ini bertujuan untuk mempresentasikan data hasil survei serta mengusulkan skema pelaksanaan program, termasuk fasilitas pendidikan yang diperlukan. Dikdasmen diarahkan untuk dapat berkolaborasi memastikan SMK yang terlibat menyediakan ruang belajar, peralatan, dan tenaga pendidik sesuai kebutuhan program. Dukungan dari SMK sebagai bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) akan memperkuat efektivitas program dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.

4. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara (Dindikpora Banjarnegara)

Setelah audiensi dengan Dikdasmen, langkah berikutnya adalah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Kerja sama ini penting untuk menjamin bahwa aspek akademik dari program, termasuk kurikulum dan kualitas pengajaran, sesuai dengan standar pendidikan nasional. Disdikbud juga akan bertanggung jawab terhadap legalitas ijazah atau sertifikat yang diterima oleh peserta program, sehingga lulusan memiliki kelayakan formal untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

5. Penyediaan Pelatihan Keterampilan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Banjarnegara

Selain pendidikan akademik, program ini juga akan menyediakan pelatihan keterampilan kerja melalui kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Banjarnegara. Maka, perlu juga untuk melakukan audiensi bersama Disnaker untuk keberlangsungan program ini. Disnaker diarahkan untuk mengirim instruktur atau tenaga ahli yang dapat memberikan pelatihan soft skills dan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sertifikat keterampilan akan diberikan kepada peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan ini, sehingga peluang mereka untuk berwirausaha maupun bekerja meningkat.

6. Legitimasi Program Melalui surat Instruksi

Setelah terjalannya kerja sama formal melalui MoU antara Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara dengan kolaborator tingkat Kabupaten, seperti Dikdasmen, Dindikpora, Disnaker, Lazismu, dan Disporapar, langkah strategis selanjutnya adalah mengimplementasikan program ini di setiap kecamatan. Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif di seluruh wilayah Banjarnegara, PD IPM akan meminta kepada kolaborator tingkat Kabupaten untuk mengeluarkan instruksi resmi kepada instansi atau lembaga terkait. Agar program ini memiliki legitimasi dan struktur yang jelas di setiap tingkat, PD IPM akan berkoordinasi dengan kolaborator tingkat Kabupaten untuk memberikan instruksi kepada cabang atau unit di tingkat daerah (kabupaten/kota). Instruksi ini akan menjadi pedoman bagi para kolaborator daerah untuk menjalankan program secara terintegrasi, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

7. Pendanaan dan Pengembangan Kewirausahaan dengan Lazismu Banjarnegara

Pendanaan merupakan elemen vital untuk kelangsungan program ini. Lazismu, sebagai lembaga filantropi Muhammadiyah, akan dilibatkan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengadaan sarana pembelajaran. Selain itu, Lazismu juga

akan diarahkan dalam program pengembangan kewirausahaan bagi peserta yang ingin membuka usaha sendiri setelah menyelesaikan program. Lazismu akan memberikan pelatihan kewirausahaan dan akses pendanaan melalui skema pembiayaan mikro atau bantuan modal usaha bagi lulusan program ini.

8. Pembentukan Lembaga Pelaksana Program

Setelah terjalin komunikasi dan MoU dengan kolaborator pada tingkat Daerah, maka langkah selanjutnya adalah pengimplementasian program tersebut pada setiap Kecamatan yang ada di Banjarnegara. Pembentukan Lembaga Pelaksana dengan nama Kawis Cendekia dengan susunan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai pemonitor serta PD IPM Banjarnegara dan PC IPM Banjarnegara sebagai Eksekutor. Lembaga tersebut memiliki beberapa peran penting diantaranya:

a. Menjadi Pusat Pendaftaran Warga Belajar

Tim Lembaga Kawis Cendekia akan mengkoordinasi pendaftaran dan pendataan bagi warga yang putus sekolah serta ingin kembali melanjutkan pendidikan. Dengan menyediakan akses informasi dan fasilitas pendaftaran, tim tersebut akan memfasilitasi proses seleksi peserta program. Mereka juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap warga belajar mendapat akses ke program ini tanpa diskriminasi.

b. Bekerja Sama dengan Dikdasmen dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana

Lembaga Kawis Cendekia akan bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk menyiapkan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar. Hal ini meliputi penyediaan ruang kelas, alat peraga, bahan ajar, serta fasilitas teknologi penunjang program tersebut. Majelis Dikdasmen yang membawahi langsung pengelolaan salah satu Amala Usaha Muhammadiyah (AUM) yaitu SMK Muhammadiyah akan menjadi mitra penting dalam menyediakan sarana ini, termasuk penyediaan fasilitas praktik bagi keterampilan teknis yang dibutuhkan warga belajar.

c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam Penjadwalan Tenaga Pendidikan

Kawis Cendekia juga akan mengkoordinasikan penjadwalan tenaga pengajar bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Dalam hal ini, PD IPM bertindak sebagai penghubung antara Disdikbud dan peserta program, memastikan bahwa jadwal pengajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan ketersediaan pengajar. Pengajar yang ditugaskan harus kompeten dan berpengalaman, serta memiliki kemampuan dalam mendidik warga belajar dari berbagai latar belakang.

d. Memfasilitasi Kebutuhan Peserta dan Kolaborator Program

Kawis Cendekia juga berperan sebagai penghubung dalam pemenuhan kebutuhan baik bagi peserta program maupun para kolaborator yang terlibat, seperti tenaga pengajar, fasilitator pelatihan, dan mitra penyedia sarana. Tugas ini mencakup koordinasi logistik, penyediaan perlengkapan belajar, dan bantuan finansial (misalnya melalui Lazismu). PD IPM akan memastikan bahwa peserta program mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, baik dari segi material maupun motivasi untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

- e. Berkoordinasi dengan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Jawa Tengah

Semua kegiatan dan program Kawis Cendekia akan berada dalam pengawasan dan koordinasi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Jawa Tengah. PW IPM akan memberikan arahan umum, strategi besar, serta dukungan kebijakan dalam pelaksanaan program ini. PD IPM di tingkat kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk melaporkan perkembangan program dan meminta arahan atau bantuan tambahan sesuai dengan kondisi di lapangan.

9. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana, pemantauan dan evaluasi berkala harus dilakukan. Lembaga Kawis Cendekia akan melaporkan perkembangan program secara berkala, baik terkait jumlah peserta, kualitas pembelajaran, maupun dampak sosial yang dicapai. Evaluasi ini akan melibatkan semua pihak, termasuk PD IPM, Dikdasmen, Disdikbud, Disnaker, dan Lazismu, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program kedepannya.

Berikut ini merupakan dokumentasi-dokumentasi persiapan yang ditempuh oleh penulis bersama PD IPM Banjarnegara dalam mengusahakan terlaksananya Program Pendampingan Warga Belajar. Langkah pertama yang ditempuh oleh penulis adalah berkoordinasi dengan Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara selaku penyelenggara bersama kegiatan sebagaimana dimaksud. Selain itu, Program Pendampingan Warga Belajar juga telah dipresentasikan dalam perlombaan Organisasi Kepemudaan Berprestasi tingkat Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan mendapat peringkat 5 terbaik kategori inovasi dan kreatifitas program kepemudaan se-Jawa tengah.



Gambar 3.1. Audiensi bersama Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Bapak Teguh Handoko, S.Sos. mengenai persiapan pelaksanaan Project kolaborasi Program Pendampingan Warga Belajar.



Gambar 3.2. Presentasi Konsep Program Pendampingan Warga Belajar di perlombaan Organisasi Kepemudaan Berprestasi tingkat Jawa Tengah tahun 2024 dan mendapat peringkat 5 terbaik kategori kreativitas dan inovasi program kerja berbasis pemberdayaan.

5. Kesimpulan

Program Pendampingan Warga Belajar di Kabupaten Banjarnegara merupakan upaya konkret untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah dengan memberikan akses pendidikan formal dan keterampilan praktis kepada masyarakat yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan

formal. Kolaborasi antara Lembaga Kawis Cendekia dengan berbagai kolaborator pada program ini memungkinkan program ini berjalan terarah, tidak hanya menyediakan pendidikan umum tetapi juga pelatihan keterampilan teknis serta soft skill yang relevan dengan dunia kerja. Pilot project di Desa Batur menjadi langkah awal yang strategis karena desa ini memiliki angka putus sekolah yang tinggi, sehingga program diharapkan mengenai sasaran yang tepat.

Program ini memberikan fleksibilitas belajar dua kali seminggu dan memadukan kurikulum formal serta keterampilan praktis, seperti manajemen waktu, komunikasi, hingga pengenalan teknologi digital. Dengan dukungan tenaga pengajar dari Dindikpora dan kolaborasi dengan Disnaker serta Lazismu, program ini juga memperluas kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan sertifikasi formal, keterampilan kerja, dan akses pembiayaan mikro. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banjarnegara dan merupakan langkah nyata dalam memberdayakan masyarakat menuju kemandirian dan produktivitas yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Agustang, A. Y. A., Herman, H., Said, M. (2021). Upaya guru IPS dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada masa Covid 19 di SMP. *Phinisi Integration Review*, 4(1), 144. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i1.19399>.
- Dacholfany, M. I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non-Formal. *Tapis Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i1.866>.
- Fauziah, S. L. (2022). Pendampingan Belajar pada Bidang Literasi dan Numerasi Siswa Sekolah Dasar di Masa Transisi. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2606–2615. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2422>.
- Fitriyanti, S., & Pradana, H. A. (2022). Analisis Pembangunan Kepemudaan di Kota Banjarbaru menggunakan Pendekatan Indeks Pembangunan Pemuda (Domain Pendidikan dan Lapangan & Kesempatan Kerja). *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 43–58. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.257>.
- Kartono, K. (2003). *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Megawanti, P. (2015). Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia. *Formatif Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(3), 227–234. <https://doi.org/10.30998/formatif.v2i3.105>.
- Nopeline, N., Sidabutar, R. C., & Hutapea, H. D. (2021). Diskusi Mengenai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pemuda Punguan Raja Panjaitan Dohot Boruna (PRPB) Kota Medan. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 101–110. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/358>.
- Popielarz, K. E. (2022). “Change Your Approach”: How Youth Organizers, Adult Allies, And Teacher Candidates Engage In The Praxis Of Community-Based Pedagogy Within Teacher Education. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 37(1), 190–212. <https://doi.org/10.1080/09518398.2022.2035454>.
- Puspito, G. W., Swandari, T., & Rokhman, M. (2021). Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 85–98. <https://doi.org/10.31538/cjotl.v1i1.88>.
- Puxley S.T., Chapin L.A. (2021). Building Youth Leadership Skills And Community Awareness: Engagement Of Rural Youth With A Community-Based Leadership Program. *Journal of Community Psychology*, 49(5), 1063–1078. <https://doi.org/10.1002/jcop.22501>.

- Santoso, A., & Rusmawati, Y. (2019). Pendampingan Belajar Siswa di Rumah melalui Kegiatan Bimbingan Belajar di Desa Guci Karanggeneng Lamongan. *Jurnal Abdimas Berdaya Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 36-43. <https://doi.org/10.30736/jab.v2i02.7>.
- Sharma, T. N. (2015). Education for Rural Transformation: The role of community learning centers in Nepal. *Journal of Education and Research*, 4(2), 87–101. <https://doi.org/10.3126/jer.v4i2.12391>.
- Sulfasyah, S., & Arifin, J. (2017). Implikasi Pendidikan Nonformal pada Remaja. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.506>.
- Suwarma, D. M., Munir, M., Wijayanti, D. A., Marpaung, M. P., Weraman, P., & Hita, I. P. A. D. (2023). Pendampingan Belajar Siswa untuk Meningkatkan Kemampuan Calistung dan Motivasi Belajar. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1234–1239.
- Syaadah, R., Ary, M. H. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal. *PEMA (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 125–131. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>.